

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memilih partai politik merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga Negara Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan partai politik yang dipilih, mereka menganggap aspirasi dapat disalurkan.<sup>1</sup> Setiap lima tahun Negara Republik Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih pemimpin baru menggantikan pemimpin lama. Dalam pemilu selalu ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang dikenal dengan sebutan golongan putih (Golput).<sup>2</sup> Golput pada awalnya adalah “gerakan moral” yang di cetuskan pada tanggal 3 Juni 1971 bertempat di Balai Budaya Jakarta, gerakan moral tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pertama pada masa orde baru.<sup>3</sup>

Dalam *website* Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat penulis mengamati dari tahun ketahun angka golput cenderung naik, golput pada 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971 ketika golput dicetuskan justru mengalami penurunan yaitu hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61%

---

<sup>1</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, h. 204-205.

<sup>2</sup> Abdurrahman Wahid dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, Jakarta: Sagon, 2009, h. 98.

<sup>3</sup> Hendri F Isnaeni, tajuk harian dengan tema “Menanti Angka Golput” diakses pukul 12:00 tanggal 4 Juli 2014.

(1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07 (1997), 10,40% (1999), 23,34% (Pemilihan Umum Legislatif 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II). Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Pada pemilu legislatif 2009 jumlah golput 30% bila dikalikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan perpu No. I/2009 sebesar 171.265.442 jiwa. Jadi jumlah golput setara dengan 51.379.633 pemilih.<sup>4</sup> Adapun pada Pileg 2014 KPU mencatat jumlah seluruh suara sah adalah 124.972.491 suara dengan angka perolehan tingkat golput mencapai 24,89 persen.<sup>5</sup>

Golput memang bukanlah nama calon atau nama sebuah partai di Indonesia, namun Golput selalu ikut andil dalam Pemilihan Umum dari masa kemasa baik dalam pemilu kepala daerah, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Fenomena golput semakin menguat pada tahn 90-an, dimana partai golongan karya (Golkar) sebagai salah satu partai peserta pemilu yang bukan dari unsur parpol, menjadi *single majority*. Kemunculan golput semakin marak ketika terjadi konsensus nasional yang menyepakati fusi beberapa parol kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hal ini dapat dilihat ketika pelaksanaan pemilu 1992. Pada pemilu kelima pada era orde baru. banyak mahasiswa terutama di Jogjakarta mengkampanyekan Golput sebagai pilihan dalam pemilu.

---

<sup>4</sup> www.kpu.go.id akses tanggal 15 Oktober 2014 pukul 21.00 WIB

<sup>5</sup> News.detik.com, di akses tanggal 10 Oktober 2014 pukul 21:41 WIB

Dalam konteks Islam sejarah mencatat, wafatnya Nabi Muhammad Saw. Pada 11 H/632 M sempat mengguncangkan umat Islam. Tidak adanya wasiat dari Nabi Muhammad Saw. untuk menunjuk pengganti pemegang kekuasaan menimbulkan polemik yang menyita konsentrasi mereka. Benih-benih fanatisme golongan mulai bersemi. Golongan Muhajirin dan Anshor adalah dua kekuatan besar yang saat itu saling menginginkan posisi kekhalifahan. Perbedaan yang terjadi pada saat rapat di saqifah bani sa'adah akhirnya membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Bagaimanapun, terpilihnya Abu Bakar memiliki arti yang monumental bagi sistem kenegaraan bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Di mana nilai-nilai yang di terapkan mencerminkan suatu sistem yang demokratis, sekaligus menepis upaya penerapan pemerintahan ala monarki. Pembai'atan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam saat itu terhadap Abu Bakar secara tidak langsung memberikan indikasi tentang legalitas kedaulatan rakyat<sup>6</sup>, meskipun belum dikenal pemilu secara langsung, namun *consensus* para Muhajirin dan Anshor ini dalam beberapa hal memiliki hakekat yang tidak jauh berbeda dengan pemilu yang ada pada saat ini.

Sosial politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang atau kelompok, dan bagaimana seseorang atau golongan tersebut dapat menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejolak politik. Partisipasi dalam pemungutan suara merupakan bentuk kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses. Namun tidak dapat

---

<sup>6</sup> Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung : Mizan, 2006, h. 179.

dipungkiri, partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali, mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya golongan putih dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dalam pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah.<sup>7</sup>

Pilkada DKI Jakarta misalnya. Jumlah masyarakat yang tidak memilih mencapai angka 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih, sementara sebagai pemenang, Fauzi Bowo hanya dipilih oleh 2 juta orang pemilih (35,1%). Dari DKI Jakarta, Pilkada berlanjut ke Jawa Barat. Meski pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf berhasil mengantongi suara terbanyak dibandingkan kontestan lain, yaitu dengan perolehan 7.287.647 suara, jumlah golput jauh lebih besar mencapai 9.130.594 suara. Begitu juga pada Pilkada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dengan 6.084.261 suara. Jumlah golput di Jawa Tengah justru menembus angka 11.854.192 suara.

Pemilih Golput menjadi "pemenang" dalam Pilkada gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008. Angka golput jauh melebihi perolehan suara lima kandidat yang bertarung dalam pilkada. Berdasarkan pantauan Kompas di Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara rata-rata hanya 60 persen dan paling tinggi sekitar 70 persen. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 30-40 persen. Itu belum termasuk surat suara yang tidak sah karena unsur

---

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris, "Golput dan Pemilu 2009", dalam *Kompas*, 30 Juni 2008

kesengajaan dari pemilih. Jika jumlah suara tidak sah dimasukkan dalam kategori golput, maka angkanya lebih besar.<sup>8</sup>

Bandingkan dengan hasil penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk Litbang Kompas. Hasilnya menunjukkan, angka terakhir perolehan suara menempatkan pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf di urutan pertama dengan peroleh suara 25,5 persen. Sementara, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di tempat kedua dengan perolehan suara sebesar 25,3 persen. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008, lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 lalu. Sebaliknya, angka golput meningkat secara signifikan.

Tidak beda jauh dengan Pilgub, Pilkada Kabupaten/kota mengalami hal yang sama. Catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menunjukkan, dari 130 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu, golput menempati posisi nomor wahid di 39 Kabupaten/kota. Koordinator Nasional JPPR, Jeirry Sumampow menilai, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi gubernur-wakil gubernur terpilih sangat rendah di mata rakyatnya sendiri. Dia memprediksi, besarnya jumlah golput dalam Pilkada akan merembet ke Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden pada 2009.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Runik Sri Astuti, "Golput Menang di Pilkada Jatim" dalam *Kompas*, Rabu, 23 Juli 2008

<sup>9</sup> Ahmad Munif. "Membangun Kesadaran Politik Umat Menghadapi Pemilu", Minggu, Jum'at 9 April 2014. Dalam [bimasIslam.kemenag.go.id](http://bimasIslam.kemenag.go.id)

Karimunjawa merupakan Kecamatan di Kabupaten Jepara yang angka golputnya meningkat dari tahun ketahun sekaligus pada pemilu legislatif Karimunjawa mendapat peringkat pertama yakni dalam hal tingkat golput paling tinggi se-Kabupaten Jepara, terbukti pada pemilu legislatif tahun 2009 jumlah golput di Karimunjawa sebanyak 27,3% sedangkan jumlah golput pada pemilihan legislatif tahun 2014 golput di Karimunjawa sebanyak 28,6% berarti dari pemilu legislatif tahun 2009 ke pemilu legislatif tahun 2014 golput di Kecamatan Karimunjawa sebanyak 0,9%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam masalah yang berkaitan dengan golput. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melihat dan menggali lebih jauh lagi khusus pada pemilu 2014 yang merupakan pemilu langsung untuk memilih anggota legislatif. Hal ini akan penulis susun dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan Judul **GOLPUT DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Analisis Perilaku Politik Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Mengapa golput terjadi dalam Pileg 2014 di Karimunjawa?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Golput?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat permasalahan yang timbul dimasyarakat khususnya :

1. Untuk Mengetahui faktor penyebab Golput pada Pileg 2014 di Karimunjawa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Siyasah dalam melihat Golput dalam Pileg 2014 di Karimunjawa

### **D. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan golput dalam perspektif fiqih siyasah sangat jarang sekali ditemukan, sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka penulis belum menemukan literatur yang secara signifikan membahas golput dalam kajian Fiqih Siyasah. Adapun buku-buku, skripsi, jurnal, majalah maupun opini yang ada masih bersikap umum, diantaranya adalah :

Buku “Mengapa Kami Memilih Golput” karya Abdurrahman Wahid dkk, mengemukakan bahwa golongan putih (golput) lebih merupakan bentuk transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap sistem dan iklim politik pemerintah yang selama ini tidak sehat.<sup>10</sup>

Selanjutnya buku “8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput” karya Miswan Thahad, menjelaskan salah satunya tentang golput yang dimuat dalam bentuk tanya jawab, sehingga memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami bagaimana sebetulnya

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid dkk, *op.cit*, h. 99.

golput dalam pandangan Syari'ah Islam, apakah memilih pemimpin (melalui pemilu) merupakan hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

Golput dalam Perspektif Islam, inilah salah satu sub judul yang ada dalam buku Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA. Yang berjudul "Tasawuf Sebagai Kritik Sosial". Dalam tulisan ini keberadaan golput dilihat dari sisi sejarah Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad saw wafat maka umat Islam sempat digoncangkan mengenai siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah. Lebih lanjut, dengan hadirnya khulafa sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah dalam urusan pemerintahan kalau dikritisi banyak indikasi-indikasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis, maka dengan fenomena semacam ini kita dapat melihat relevansi pemilu atau golput dalam wacana tarikh Islam era klasik.

Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul "Kebebasan, Negara, Pembangunan" yang merupakan kumpulan tulisan 1965-2005, ia menyatakan pendapatnya bahwa golput pada saat ini hukumnya "tidak wajib" hal ini dikarenakan pemilu 2004 partai bebas berdiri dan tidak dihalangi oleh pemerintah, tidak seperti pada 1972 di mana partai-partai yang tidak disukai pemerintah saat itu dilarang berdiri (kembali).<sup>12</sup>

Miriam Budiardjo, dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Ilmu Politik", membahas masalah golput dalam salah satu sub babnya, ia menjabarkan ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukan oleh

---

<sup>11</sup> Miswan Thahad, *8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*, Jakarta : Al-I'stisham, 2009, h. 61.

<sup>12</sup> Arif Budiman, *Kebebasan Negara Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005* Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006, h. 31



pemerintah, yakni: kategori suara tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih, namun oleh media massa hal ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk didalamnya.<sup>13</sup>

Sigit Pamungkas, dalam bukunya yang berjudul “Pemilu, Prilaku Pemilih, dan Kepartaian”. Ia menjelaskan dalam salah satu sub babnya tentang beberapa tafsir tentang golput.<sup>14</sup> Syamsul Hadi Thubany, dalam bukunya yang berjudul “Partisipasi Semu”, ia menjelaskan bahwa partisipasi warga merupakan proses melibatkan warga masyarakat dalam pembuatan keputusan bersama dalam hal pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan daerahnya<sup>15</sup>

Selain beberapa buku tersebut, terdapat beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, yang juga membahas tentang golput dari kaca mata dan kajian yang berbeda, antara lain:

Dalam skripsi Stephanus Mulyadi dengan judul “Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus Pemilu 1992”.<sup>16</sup> Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang”.<sup>17</sup> Begitu pula skripsi yang ditulis oleh Riki Marjono,

---

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 91

<sup>14</sup> Sigit Pamungkas, *Pemilu, Prilaku Pemilih dan Kepartaian*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010. H. 47.

<sup>15</sup> Syamsul Hadi Thubany, *Partisipasi Semu*, Tuban : Bina Swagiri, 2004, h. 85.

<sup>16</sup> Stephanus Mulyadi, *Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992*,” Skripsi, Jogjakarta, Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999, h. 112, td.

<sup>17</sup> Ahmad Fauzan, “Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang Panjang” Skripsi, perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009, h, 45, td.

yang berjudul “ Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)”<sup>18</sup> Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rojikin, yang berjudul “Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003; Tentang Pemilu)”, dalam skripsi mengulas tentang bagaimana hukum pemidanaan mengajak golput pada pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003, dan bagaimana pandangan Islam terhadap materi dan sanksi pengajak golput pada pasal 139 UU no. 12 Tahun 2003.<sup>19</sup>

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan tentang fenomena golput dalam politik nasional khususnya, faktanya pembicaraan mengenai golput menjadi diskusi yang menarik karena keberadaannya yang selalu eksis dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, oleh karena itu penulis mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang politik Islam. Dan yang membedakan tulisan ini dengan tulisan yang sudah adalah, tulisan ini mencoba mengkaji faktor yang melatar belakangi terjadinya golput dalam Pileg 2014 di Karimunjawa dan pandangan fiqih siyasah terhadap golput.

---

<sup>18</sup> Riki Marjono, Hukum Golput dalam Pemilu Di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)” skripsi, Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009, h. 93, td

<sup>19</sup> Ainur Rojikin, “Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003)” skripsi, Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. 32.

## E. Kerangka Teoritik

Mendirikan sebuah negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak akan mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan.<sup>20</sup> Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan, dan keadaban hanya mungkin dicapai melalui negara dan pemerintahan.

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>21</sup> Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma'. Para mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan kecuali kelompok Syi'ah<sup>22</sup> bersepakat bahwa jalan mencapai kursi keimamahan harus melalui pemilihan dan kemufakatan, yang dapat diartikan bahwa jabatan tersebut didapatkan bukan dari wasiat atau penunjukan. Untuk memahami hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada di dalam penelitian ini.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual

---

<sup>20</sup> Syaifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 13.

<sup>21</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj) Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 15.

<sup>22</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*(terj) Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 166.

atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>23</sup> Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (sistem politik).<sup>24</sup>

Selanjutnya jika dipahami substansi dari aspek politik-demokrasi yang ada di atas maka lahirlah adanya sebuah proses dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa atau negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya, artinya tidak boleh adanya sebuah paksaan kepada mereka untuk memilih seorang pemimpin tertentu yang tidak dikehendaki, ketentuan ini sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh Agama Islam melalui perangkat syura (permusyawaratan) dan ba'iat (komitmen ketundukan yang disertai kontrak politik yang mengikat rakyat untuk tunduk kepada pemimpin yang dipilihnya), tegas Yusuf al-Qardhawi.<sup>25</sup>

Dalam teori pilihan rasional dikemukakan bahwa manusia politik (homo politicus) sudah menuju kearah manusia ekonomi (homo

---

<sup>23</sup> AbdulYani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Jakarta: Fajar Agung, cet. Ke-1, 1987, h. 170

<sup>24</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, h. 144

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik; Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*, (terj) Khoirul Amru Harahap, Lc, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 188.

economicus), hal ini berkaitan erat dengan adanya faktor politik dan ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan publik.<sup>26</sup> Artinya kebijakan politik haruslah dilaksanakan dengan baik<sup>27</sup> dan memiliki garis lurus dengan ekonomi atau kesejahteraan rakyatnya.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian.

#### ▪ Penelitian Lapangan

Yakni penelitian yang dilakukan penulis dengan terjun langsung dalam hal ini adalah ke Karimunjawa, masyarakat secara umum dan tempat pemungutan suara untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan golput.

#### ▪ Pendekatan Kualitatif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian,

---

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 92.

<sup>27</sup> SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2007, h. 260.

maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### ▪ Observasi (pengamatan)

Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada khususnya adalah masyarakat Karimunjawa.

### ▪ Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari KPU, buku-buku, artikel dan hasil wawancara dan hal-hal yang terkait.

### ▪ Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung ke masyarakat Karimunjawa, tokoh masyarakat Karimunjawa, dan KPU sehingga penulis mengetahui langsung apa yang penulis ingin ketahui.

## 3. Metode Analisis

### ▪ Deskriptif Kualitatif

Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dalam hal ini adalah golput Pileg 2014 di Karimunjawa. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di Karimunjawa. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan

situasi atau peristiwa Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

- *Content Analysis*

Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam kajian ini dibagi dalam beberapa bab serta sub bab untuk memudahkan memahai kajian ini secara runtut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga pada bab ini sangat penting untuk diadakan pada karya tulis ini, dan kemudian kami beri sub bab “Pendahuluan”

## **BAB II : Tinjauan Umum Tentang perilaku Politik Dalam Fiqh Siyasah**

Bab ini merupakan tinjauan umum tentang perilaku politik dalam siyasah yang berisi pengertian perilaku politik, golput sebagai perilaku politik, dasar-dasar fiqh siyasah dalam perilaku politik, pendapat para ulama tentang pemilihan pemimpin. Dalam sub bab ini penulis memberi judul “Tinjauan Umum Tentang perilaku Politik Dalam Fiqh Siyasah”

## **BAB III : Golput Masyarakat Karimunjawa Pada Pemilu Legislatif 2014.**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai profil masyarakat Karimunjawa, dan fenomena golput dikalangan masyarakat Karimunjawa pada pemilu legislatif 2014. Maka pada sub bab ini penulis memberi judul “Golput Masyarakat Karimunjawa Pada Pemilu Legislatif 2014”

## **BAB IV: Analisis Golput Masyarakat Karimunjawa Pada Pemilu Legislatif 2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**



Pada bab ini Berisi Analisis Golput masyarakat Karimunjawa pada pemilu legislatif 2014, dan Analisis golput dalam perspektif fiqih siyasa.

#### BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan dalam hal ini sebagai jawaban rumusan masalah.dalam sub bab inipenulis beri judul “Penutup”